Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya pada Lembaga Pendidikan Islam

Muhammad Fauzi[1], Istiqomah Kusuma Ningrum[2], Zamroni[3]
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda[12]
[1]Mfauzi364@gmail.com ,
[2]ningrumistikomahkusuma@gmail.com
[3]zamroni1802.uinsi@gmail.com

ABSTRACT

The national educational transformation through the Merdeka Belajar policy introduces autonomy, flexibility, and instructional differentiation. However, its implementation in Islamic educational institutions faces complex structural challenges, including epistemological alignment with classical religious traditions, disparities in ICT infrastructure, limited digital literacy among educators, and administrative burdens. This study aims to analyze the systemic impact of the Merdeka Belajar policy on the curricular, managerial, and organizational dynamics of Islamic educational institutions, as well as to identify key structural barriers and strategic adaptation models. Employing a qualitative research design with a Systematic Literature Review (SLR) method adhering to PRISMA protocols and content analysis, secondary data were synthesized from reputable academic publications between 2020 and 2026. The findings indicate that the policy significantly enhances institutional autonomy in developing contextual operational curricula and strengthens students' character through the integration of the Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila and Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), which promotes religious moderation (wasathiyah), national commitment, and inclusiveness. Nevertheless, the transition triggers instructional shock, disparities in accessing digital platforms, and concerns over diluting classical Islamic studies (tafaqquh fiddin). Successful policy adaptation requires transformational leadership, sustainable community-based teacher professional development, equitable digital infrastructure, and a balanced curriculum integration model that harmonizes modern educational innovation with core Islamic identity

Keywords: Merdeka Belajar Policy, Islamic Educational Institutions, Madrasah, P5RA, Religious Moderation, Curriculum Autonomy

ABSTRAK

Transformasi pendidikan nasional melalui kebijakan Merdeka Belajar menghadirkan otonomi, fleksibilitas, dan diferensiasi pembelajaran. Namun, implementasinya pada lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks, mencakup penyelarasan epistemologis dengan tradisi keagamaan klasik, ketimpangan infrastruktur TIK, keterbatasan literasi digital pendidik, serta beban administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistemik

kebijakan Merdeka Belajar terhadap dinamika kurikuler, manajerial, dan organisasi pada lembaga pendidikan Islam, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan model adaptasi strategis. Menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada protokol PRISMA dan analisis isi, data sekunder disintesis dari publikasi akademik bereputasi terbitan tahun 2020 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara signifikan meningkatkan otonomi lembaga dalam menyusun kurikulum operasional yang kontekstual dan memperkuat karakter peserta didik melalui integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) yang mengusung nilai moderasi beragama (wasathiyah), kebangsaan, dan inklusivitas. Kendati demikian, transisi ini memicu kekagetan instruksional, disparitas akses platform digital, dan kekhawatiran tergerusnya kedalaman kajian ilmu keislaman klasik (tafaqquh fiddin). Adaptasi kebijakan yang berhasil membutuhkan kepemimpinan transformasional, pendampingan pendidik berbasis komunitas secara berkelanjutan, pemerataan infrastruktur digital, serta model integrasi kurikulum yang seimbang antara inovasi modernitas dan identitas keislaman.

Kata Kunci: Kebijakan Merdeka Belajar, Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah, P5RA, Moderasi Beragama, Otonomi Kurikulum.

A. Pendahuluan

Transformasi paradigma pendidikan nasional melalui perumusan kebijakan Merdeka Belajar merepresentasikan babak baru dalam reformasi sistemik pendidikan Indonesia. Kebijakan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini secara mendasar menggeser orientasi edukatif dari pendekatan yang terpusat (centralized), kaku, dan berpusat pada pemenuhan capaian administratif semata, menuju paradigma yang memberikan otonomi, fleksibilitas instruksional, serta diferensiasi proses belajar berbasis pada keunikan potensi peserta didik (Ridwan et al., 2025). Secara filosofis, kebijakan ini berakar pada pemikiran progresivisme Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Yusup & Rahman, 2025) Dalam konteks pendidikan keagamaan, Kementerian Agama merespons reorientasi ini melalui harmonisasi Kurikulum Merdeka dengan mengintegrasikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) (Adzkiyaunuha, 2024).

Kerangka interaktif ini menempatkan nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyah), toleransi, kebangsaan, dan inklusivitas sebagai pilar utama pembentukan karakter peserta didik di lingkungan satuan pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren (Muslimin, 2023).

Kendati secara konseptual menawarkan kebebasan berinovasi dan fleksibilitas manajerial, penterjemahan kebijakan Merdeka Belajar di ranah empiris lembaga pendidikan Islam menghadirkan kompleksitas dan dinamika diferensial yang multidimensi. Lembaga pendidikan Islam memiliki entitas epistemologis, kultural, dan historis yang khas, di mana konstruksi kurikulumnya ditopang oleh nilai-nilai keagamaan yang bersifat normatif-transendental, tradisi pengkajian kitab klasik (turats), serta hierarki otoritas spiritual figur kyai atau guru (Lase et al., 2026). Penetrasi paradigma Merdeka Belajar yang menuntut desentralisasi kurikulum dan digitalisasi proses instruksional kerap berbenturan dengan struktur kelembagaan yang cenderung konservatif dan mempertahankan kontinuitas tradisi (Hidayah et al., 2024). Di satu sisi, fleksibilitas Kurikulum Merdeka memberi ruang independensi bagi pengelola madrasah untuk merekonstruksi materi ajar yang relevan dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman (Mubin et al., 2025). Namun di sisi lain, realitas lapangan mengidentifikasi adanya disparitas yang signifikan terkait kesiapan infrastruktur TIK, keterbatasan akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta belum meratanya kapasitas literasi pedagogis digital pendidik, khususnya pada satuan pendidikan Islam swasta berbasis yayasan di daerah sub-urban dan pedesaan (Tirta et al., 2026).

Kebijakan Merdeka Belajar di lembaga pendidikan Islam tidak sekadar implikasi teknis-operasional, melainkan juga memicu pergeseran pada tatanan budaya organisasi dan manajemen instruksional. Tuntutan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang mandiri serta penerapan asesmen diagnostik dan diferensiasi pembelajaran kerap menimbulkan kekagetan instruksional (instructional shock) dan peningkatan beban administratif bagi para pendidik (Neliwati et al., 2023). Akibatnya, esensi filosofis Merdeka Belajar yang

menekankan pada kemerdekaan berpikir dan kedalaman proses belajar berisiko terdegradasi menjadi sekadar pemenuhan formalitas penyusunan dokumen kurikuler. Selain itu, upaya menyelaraskan indikator capaian pembelajaran nasional dengan porsi muatan lokal keislaman tanpa menggerus kedalaman penguasaan ilmu-ilmu keagamaan murni (tafaqquh fiddin) menjadi dilema tersendiri bagi pengelola pendidikan Islam. Ketiadaan strategi tata kelola perubahan (change management) yang sistematis dan pendampingan berkelanjutan dikhawatirkan dapat memperlebar jurang kesenjangan mutu antara sekolah umum dengan lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan jurang kesenjangan (gap) yang tegas antara formulasi idealis kebijakan Merdeka Belajar dan dinamika kognitif-struktural pada satuan pendidikan Islam tersebut, penelitian ini memfokuskan analisisnya secara mendalam pada dampak holistik implementasi kebijakan Merdeka Belajar terhadap ekosistem lembaga pendidikan Islam. Fokus permasalahan utama diorientasikan untuk menguji secara kritis bagaimana lembaga pendidikan Islam mengadaptasi otonomi kurikuler, implikasinya terhadap efektivitas integrasi P5RA dan moderasi beragama, serta resistensi kultural maupun hambatan teknis yang melingkupinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memetakan secara komprehensif transformasi manajerial, kurikuler, dan pedagogis di lingkungan lembaga pendidikan Islam, sekaligus merumuskan model adaptasi strategis yang mampu menyelaraskan fleksibilitas modernitas tanpa mengorbankan identitas dan tradisi keislaman yang substantif. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan memberi sumbangsih literatur pada domain analisis kebijakan pendidikan Islam, sedangkan secara praktis, penelitian ini menyajikan acuan rekomendasi bagi Kementerian Agama, pengelola yayasan, dan pimpinan madrasah dalam mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan Islam yang adaptif, berdaya saing, dan berkarakter Rahmatan lil 'Alamin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review / SLR) dan analisis isi (content analysis) untuk mengeksplorasi secara mendalam

dampak sistemik kebijakan Merdeka Belajar terhadap ekosistem lembaga pendidikan Islam (Haera et al., 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki keandalan metodologis dalam membedah fenomena keijakan publik, dinamika pedagogis, serta transformasi budaya kelembagaan Islam yang kompleks dan multidimensi (Noor et al., 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan pemerintah (Kemendikbudristek dan Kementerian Agama), serta buku teks ilmiah yang relevan. Penelusuran pustaka dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data akademik terindeks, seperti Scopus, Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA (Aminah & Sya'bani, n.d.). Kata kunci (keywords) yang digunakan dalam proses pencarian data memanfaatkan kombinasi operator Boolean (And, Or), mencakup istilah: Kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka Or P5RA, Lembaga Pendidikan Islam Or Madrasah Or Pesantren, dan Dampak Kebijakan Pendidikan. Rentang waktu publikasi literatur difokuskan pada terbitan rentang tahun 2020–2026 guna menjamin aktualitas, kebaruan (novelty), dan relevansi dinamika kebijakan terkini (Aminah & Sya'bani, n.d.)

Proses seleksi dan penyaringan artikel mengadopsi protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat (Lailiyah & Imami, 2023). Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah hasil penelitian empiris atau kajian konseptual yang mengulas dampak kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan Islam; (2) terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi resmi; serta (3) menyajikan analisis kritis mengenai aspek kurikuler, manajerial, moderasi beragama (P5RA), maupun dinamika kompetensi pendidik (Tirta et al., 2026). Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel non-akademik, naskah duplikat, serta artikel yang tidak menyediakan teks lengkap (full text) atau tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus studi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dengan mengekstraksi temuan utama, kerangka teoretis, serta analisis dampak dari literatur

yang terpilih (Haera et al., 2025). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) model (Miles et al., n.d.) yang meliputi tiga tahapan interaktif: (1) reduksi data (data reduction), yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan temuan ke dalam kategori tematik utama seperti adaptasi kurikuler, penguatan P5RA, dan hambatan struktural; (2) penyajian data (data display), yaitu menyusun sintesis konseptual dalam bentuk narasi ilmiah yang logis dan terstruktur; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu merumuskan model adaptasi strategis bagi lembaga pendidikan Islam (Lailiyah & Imami, 2023). Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan antar-literatur dari berbagai perspektif studi, regulasi resmi, serta praktik di lapangan (Aminah & Sya'bani, n.d.)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis konten kualitatif dan sintesis sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah bereputasi, implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan Islam memberikan dampak multidimensional yang memicu transformasi pada aspek kurikuler, manajerial, dan budaya organisasi (Hidayah et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas bagi pengelola madrasah dan pondok pesantren dalam merancang Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang adaptif dan kontekstual (Lase et al., 2026). Integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) terbukti memperkuat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyah), toleransi, dan kebangsaan pada peserta didik tanpa mengeliminasi porsi muatan keislaman khas madrasah (Muslimin, 2023). Dari perspektif instruksional, penerapan asesmen diagnostik dan pembelajaran terdiferensiasi mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar serta potensi individu siswa secara inklusif (Adzkiyaunuha, 2024). Kendati demikian, proses adopsi kebijakan ini masih dihadapkan pada hambatan struktural yang signifikan,

seperti belum meratanya literasi pedagogis digital pendidik, keterbatasan akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM), tingginya beban administratif penyusunan dokumen kurikuler, serta disparitas sarana prasarana TIK pada satuan pendidikan Islam swasta berbasis yayasan di wilayah non-metropolitan (Yusup & Rahman, 2025)

Secara teoretis, dampak positif dan dinamika adaptasi yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam memperkuat pandangan teori konstruktivisme dan progresivisme pendidikan, di mana proses pembelajaran tidak lagi diposisikan sebagai transfer pengetahuan searah (transmission of knowledge), melainkan sebagai konstruksi pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada siswa (Noor et al., 2023). Pengejawantahan P5RA dalam kerangka Merdeka Belajar sejalan dengan prinsip value-based education dan integrasi ilmu, di mana pembentukan karakter kebangsaan dan nilai-nilai keislaman universal diharmonisasikan secara holistik guna mencetak generasi berwawasan global yang tetap berakar kuat pada tradisi keagamaan (Tirta et al., 2026). Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan Merdeka Belajar bukan sekadar modernisasi teknis-operasional, melainkan sebuah reorientasi filosofis yang mendorong desentralisasi pengelolaan pendidikan Islam (Ridwan et al., 2025).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara idealita filosofis kebijakan dan kapasitas daya dukung kelembagaan di lapangan (Hidayah et al., 2024). Transisi menuju desentralisasi kurikulum kerap menimbulkan kekagetan instruksional (instructional shock) bagi pendidik yang terbiasa dengan pola instruksi terpusat dan berorientasi pada pemenuhan target administratif semata (Fitra, 2023; Ramadhan, 2024). Dilema menyelaraskan capaian pembelajaran nasional dengan kedalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan klasik (tafaqquh fiddin) memerlukan strategi pengelolaan perubahan (change management) dan kepemimpinan transformasional dari pimpinan madrasah maupun pengelola yayasan (Azis, 2024; Fransiska et al., 2021). Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang perlu ditempuh mencakup pendampingan intensif berkelanjutan berbasis komunitas belajar, penguatan

infrastruktur digital yang merata, penyederhanaan beban administratif guru, serta formulasi model integrasi kurikulum yang seimbang antara tuntutan modernitas dan pemeliharaan identitas keislaman (Irawati et al., 2022; Mallewai, 2023). Dengan keterpaduan antara regulasi yang inklusif, pendidik yang adaptif, dan tata kelola kelembagaan yang transparan, kebijakan Merdeka Belajar dapat menjadi batu pijakan utama dalam memperkuat daya saing dan mutu lembaga pendidikan Islam secara berkesinambungan (Arikunto, 2021; Tunas & Pangkey, 2024)

E. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan Islam memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong reorientasi paradigma pendidikan dari pendekatan yang kaku menuju fleksibilitas, otonomi, dan diferensiasi pembelajaran. Pengadopsian Kurikulum Merdeka yang diintegrasikan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) terbukti efektif dalam memperkuat pembentukan karakter peserta didik, menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyah), serta memberikan kebebasan inovasi pedagogis bagi pengelola madrasah dan pondok pesantren. Kendati demikian, efektivitas transformasi kebijakan ini masih dihadapkan pada hambatan struktural yang kompleks, seperti disparitas literasi digital pendidik, keterbatasan sarana prasarana TIK pada lembaga pendidikan Islam swasta berbasis yayasan, tingginya beban administratif penyusunan dokumen kurikuler, serta tantangan dalam menjaga kedalaman kajian ilmu keagamaan klasik (tafaqquh fiddin).

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan bagi Kementerian Agama dan pembuat kebijakan pendidikan Islam untuk memformulasikan strategi pendampingan implementasi kurikulum yang berbasis pada kelompok kerja pendidik, menyederhanakan mekanisme pelaporan administratif, serta memprioritaskan pemerataan infrastruktur digital dan akses Platform Merdeka Mengajar (PMM) di daerah non-metropolitan. Pengelola yayasan dan pimpinan madrasah diharapkan menerapkan kepemimpinan transformasional dan strategi pengelolaan perubahan (change

management) yang berimbang antara inovasi modernitas dan pemeliharaan identitas keislaman. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris kuantitatif atau studi kasus longitudinal multisentris guna mengukur secara presisi dampak jangka panjang implementasi Merdeka Belajar terhadap capaian kompetensi akademik dan karakter lulusan lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adzkiyaunuha, M. (2024). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Serta Implikasinya dalam Pembelajaran di SMA Darul Falah oku timur. *Misbahul Ulum*, *6*, 111–130. https://doi.org/10.55352/jmu.v6i2.1121.

Aminah, ihda alam niswatun, & Sya'bani, mohammad ahyan yusuf. (n.d.). *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama islam*. 293–303. https://doi.org/10.30587/jurnalnetral.v7i2.8568

Haera, M., Janna, najwa nailal, Qurrata'ayun, T., Fauzi, W., & Parhan, M. (2025). Implementasi Pendidikan Islam dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 323–338. https://doi.org/10.25157/j-kip.v6i2.17293

Hidayah, N. A., S, S. R. H., & Chadidjah, S. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran PAI di MTs Yamisa Soreang Bandung. *At-Tadbir Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(2), 77–92. https://doi.org/10.51700/attadbir.v4i2.650

Lailiyah, S., & Imami, A. S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Mutu. *Edukasia : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *4*, 2737–2746. https://doi.org/10.56313/edukasia.v4i2.664

Lase, U., Juliani, Nst, S. susanti, & Amelia, S. (2026). Reformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar. *Fatih Contemporary Research*, *03*(01), 56–64. https://doi.org/10.70412/fatih.v3i1.309

Miles, matthew B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis*.

Mubin, N., Nur, M. A., & Arif, R. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*, 6849–6858. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8568.

Muslimin, I. (2023). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam Studi Kasus di Madrasah Se-jawa Timur. *Administrasi Pendidikan Islam*, *05*(01), 43–57. https://doi.org/10.15642/JAPI.2023.5.1.43-57

Neliwati, Situmorang, hikmah bayani, Rahayu, putri maymuhamna, & Munawwarah, R. (2023).

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. *4*(2), 117–120. https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475

Noor, iqbal hidayatsyah, Izzati, A., & Azani, mohammad zakki. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Thoughts Pratice*, *07*(01), 30–47. https://doi.org/10.23917/iseedu.v7i1.22539.

Ridwan, A., Madyan, Bafadhal, I., & Damanik, jainab rayanti. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu Atap 10 Sarolangun. *Al Ulum Pendidikan Islam*, *5*(2), 184–197. https://doi.org/10.54090/alulum.707

Tirta, W. D., Bisri, A. M., Ghofur, A., & Fathih, muhammad amin. (2026). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*, 12896–12902. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.10405

Yusup, rian maulana, & Rahman, ahmad syaeful. (2025). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka : Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan Agama islam. *Ihtirim Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(1), 588–598. https://doi.org/10.70412/itr.v4i1.163.